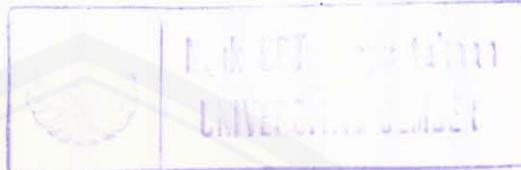


Digital Repository Universitas Jember
**PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP
PADA PTP NUSANTARA XI (PERSERO)
PG. SEMBORO**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**



Asal : Studi h
Distribusi
Terima : 27 AUG 2001
No 1 : 226568
Klass : 336.2
4142
p - e 1

Oleh :

Elmi Muzayyanah

NIM. 980903101093

Dosen Pembimbing :

Drs. DIDIK EKO JULIANTO

NIP. 131 832 303

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

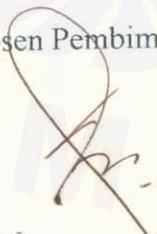
Telah di setujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : ELMI MUZAYYANAH
N.I.M : 980903101093
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Penghitungan dan Pemotongan
PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada
PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro

Jember, 19 Juni 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. DIDIK EKO JULIANTO

NIP. 131 832 303

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

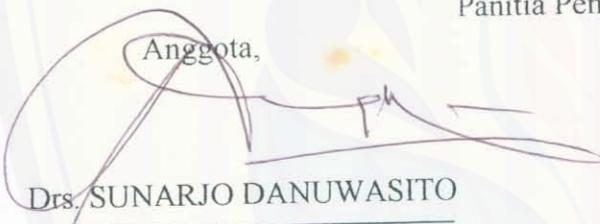
Nama : ELMU MUZAYYANAH
N.I.M : 980903101093
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pelaksanaan Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21
atas Gaji Pegawai Tetap pada PTPN XI (Persero)
PG. Semboro

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juli 2001
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji

Anggota,


Drs. SUNARJO DANUWASITO

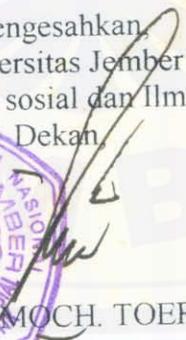
NIP. 130 261 789

Ketua,


Drs. DIDIK EKO JULIANTO

NIP. 131 832 303

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Dekan,


Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tidak terhingga disampaikan kehadirat Alloh SWT atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan. Namun untuk penyelesaiannya telah diupayakan dengan semaksimal mungkin agar dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu kritik atau saran yang membangun akan penulis terima dengan penuh ikhlas sebagai suatu evaluasi.

Terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Agus Budiharjo, MA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi
3. Bapak Drs. Sasongko, M.Si selaku ketua program D-III Perpajakan
4. Bapak Drs. Rahmat Murjana selaku dosen wali.
5. Bapak Drs. Didik Eko Julianto selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan pengarahan hingga terselesaikannya laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, serta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu kelancaran penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.
7. Bapak Ratono BSc. selaku Administratur PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PG. Semboro.

8. Bapak H.M Aboezairi selaku kepala bagian Administrasi Keuangan dan Umum atas kesediaannya menerima penulis untuk ditempatkan dibagian Administrasi Keuangan dan Umum (AKU).
9. Ibu Dra. Endah Kusumaningrum, selaku pembimbing di PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro.
10. Seluruh karyawan dan karyawan PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro, khususnya bagian Administasi Keuangan dan Umum.
11. Bapak dan Ibu tercinta beserta kakak-kakakku mas Fud, Nurul, Ahmad yang selalu mengiringi langkahku dengan kasih sayang dan do'a.
12. Mas Joko, Dian dan sahabat-sahabatku di D-III Perpajakan, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakkannya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap laporan yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga mendapat rahmad dari Allah SWT. Amien.....

Jember, Mei 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	2
1.3 Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN).....	2
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat PG. Semboro	3
2.2 Pemekaran Kapasitas.....	4
2.3 Produk yang Dihasilkan	4
2.4 Struktur Organisasi PG. Semboro	4
2.5 Aspek Personalia PG. Semboro	
2.5.1 Status Hubungan Kerja Karyawan Dengan Perusahaan...	6
2.5.2 Jumlah Karyawan PG. Semboro	8
2.5.3 Hak-hak Karyawan.....	8
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)	
3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	
3.1.1 Diskripsi (Gambaran) Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	13
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)	15

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya	28
--	----

IV. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	14
2. Rekapitulasi Jumlah Jam Lembur Model AU 16	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata (PKN)	32
2. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN)	33
3. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata (PKN)	34
4. Struktur Organisasi PG. Semboro.....	35
5. Laporan Posisi Tenaga Kerja PG. Semboro	36
6. Surat Setoran Pajak (SSP).....	40
7. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21.....	45
8. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan 26	51
9. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21	53
10. Bukti Penerimaan Surat	54
11. Formulir Perintah Kerja Lembur (AU 16).....	55
12. Daftar Gaji + Tunjangan Pegawai Tetap Golongan IA s/d IID	56
13. Daftar Gaji Pegawai Tetap Golongan IIIA s/d IVD	57

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Nyata di PG. Semboro

Pembangunan Nasional Jangka Panjang dewasa ini mengarah pada bidang industri yang berteknologi modern. Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan swasta sebagai pelaku ekonomi harus lebih dimaksimalkan karena meningkatkan perekonomian. BUMN dan perusahaan swasta diharapkan akan dapat menambah pendapatan yang besar pada negara dengan mengarahkan sumber daya yang ada baik SDM maupun non SDM.

PT Perkebunn Nusantara XI (Persero) PG. Semboro sebagai salah satu pelaku ekonomi harus mampu bersaing dalam segala aspek dengan mengarahkan sumber daya, untuk menghadapi tantangan dalam era globalisasi dan pasar bebas pada masa mendatang.

Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan cara meningkatkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan tentang dunia kerja. Dimana SDM sebagai salah satu aspek kompetitif organisasi dan subyek atau penggerak organisasi dalam mengatur dan melaksanakan perangkat-perangkat organisasi.

Mahasiswa sebagai elemen kerja /SDM harus siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Dalam hal ini di tuntut tidak hanya menguasai teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah., tetapi harus menguasai keterampilan-keterampilan khusus dalam lingkungan kerja yang bisa di peroleh melalui aplikasi dalam program Praktek Kerja Nyata (PKN). Sehingga ada keseimbangan dalam tatanan konsep dan tatanan praktis yang akan sangat bermanfaat setelah menyelesaikan pendidikan formal dari unversitas.

Dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan yang telah diperoleh dari bangku kuliah, maka Diploma III Perpajakan Universitas Jember mengadakan program Praktek Kerja Nyata (PKN). Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan untuk memperoleh keterampilan praktis dalam organisasi bisnis serta mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)

PG. Semboro dengan alasan lembaga tersebut bergerak di bidang produksi gula dan merupakan wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.001.174.9.266.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PG. Semboro.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Untuk memperoleh pengalaman praktis yang berhubungan dengan mekanisme perpajakan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir.
- c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang perpajakan.

1.3 Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) berlangsung selama 1 (satu) bulan efektif pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Semboro di bagian Administrasi Keuangan dan Umum (AKU) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Semboro yang berkedudukan di Jalan Merak no. 1 Surabaya terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan berakhir tanggal 12 April 2001, dengan jam kerja sebagai berikut :

Senin sampai Kamis : pukul 06.30 BBWI - 15.00 BBWI

Jumat : pukul 06.00 BBWI - 11.00 BBWI

Sabtu : pukul 06.30 BBWI - 11.30 BBWI

Istirahat : pukul 11.30 BBWI - 12.30 BBWI

II. GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat PG. Semboro

Pabrik Gula Semboro merupakan unit usaha dari PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang didirikan pada tahun 1921 oleh HVA (Handels Vereniging Amsterdam) sebagai pemilik swasta dari negeri Belanda dengan kapasitas 24.000 kuintal tiap 24 jam. Pada tahun 1928 pabrik siap dan mulai menggiling tebu. Tahun 1930 sampai dengan 1932 pabrik mulai menggiling dengan kapasitas penuh dengan luas lahan 2.103 ha. Tahun 1933 sampai dengan 1937 aktivitasnya terhenti dan mulai menggiling kembali tahun 1938 dengan luas lahan 1.271,4 ha.

Sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 kegiatan terhenti akibat pendudukan Jepang, Pabrik Gula Semboro dijadikan pabrik soda. Sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga akhir 1949 Pabrik Gula Semboro dijadikan pabrik amunisi untuk mensuplai persenjataan para pejuang. Selama itu PG. Semboro mengalami kerusakan sehingga harus diadakan perbaikan sesudah masa perang.

Tahun 1950 PG. Semboro diaktifkan kembali sampai berakhirnya penguasaan bangsa asing. Tahun 1957 diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak diambil alih Pemerintah Republik Indonesia tahun 1968, PG. Semboro termasuk dalam PPN Inspektorat VIII yang berkedudukan di Jalan Jembatan Merah Surabaya bersama dengan PG. De Maas, PG. Wringin Anom, PG. Olean, PG. Panji, PG. Asem Bagoes dan PG. Pradjekan.

Sejak masa giling 1969 sampai dengan 1975, PG. Semboro termasuk PNP XXIV bersama PG. Kedawoeng, PG. Wonolangan, PG. Gending, PG. Padjarakan dan PG. Djatiroto. Tahun 1975 PNP XXIV dan XXV digabungkan, PG. Semboro termasuk dalam lingkup PT Perkebunan XXIV- XXV (Persero) yang berkedudukan di Jalan Merak no. 1 Surabaya.

Mulai tanggal 11 Maret 1996 PT Perkebunan menjadi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang meliputi 17 pabrik gula, 4 rumah sakit, 1 pabrik karung, 1 PASA (Pabrik Alkohol dan Spiritus) di wilayah PT Perkebunan XXIV – XXV (Persero) dan PT Perkebunan XX (Persero). PT Perkebunan Nusantara XI

(Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tanggal 4 Pebruari 1996 dengan akte notaris No. 44 Tahun 1996 pada tanggal 11 Maret 1996.

2.2 Pemekaran Kapasitas

Pada tahun 1978 PG. Semboro mengalami pemekaran kapasitas dari 2.400 menjadi 4.800 ton per hari dengan proses sulfitasi, kemudian pada tahun 1982 mengalami pemekaran kapasitas lagi menjadi 5.400 ton tebu per hari.

2.3 Produk yang Dihasilkan

Selama proses produksi PG. Semboro menghasilkan 2 (dua) produk utama yaitu gula pasir dan tetes. Tetes yang dihasilkan pabrik gula di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) sebagian diolah sendiri menjadi alkohol dan spiritus yang pabriknya berlokasi di Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan sebagian lagi di jual pada perusahaan-perusahaan lain untuk dijadikan bumbu masak dan pupuk cair. Selain gula dan tetes dari proses produksi juga menghasilkan limbah yang disebut blotong dan dapat digunakan sebagai pupuk dan bahan bakar untuk ketel.

2.4 Struktur Organisasi PG. Semboro

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan dan pola tetap hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi PG. Semboro termasuk dalam struktur organisasi fungsional yang terbagi dalam bagian-bagian berdasarkan pada tingkat dan fungsi yang diperlukan. Secara lengkap struktur organisasi PG. Semboro dapat dilihat pada lampiran 4.

Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada PG. Semboro adalah sebagai berikut :

1. Administratur

Membawahi :

- a. Kepala Tanaman
- b. Kepala Administrasi Keuangan dan Umum
- c. Kepala Instalasi
- d. Kepala Pabrikasi

Fungsi dan tanggung jawab :

- a. Memimpin, mengkoordinasi dan menggerakkan seluruh karyawan.
- b. Mengawasi segala kegiatan sehingga dapat mengetahui berapa besar pemasukan dan pengeluaran baik ekstern maupun intern.

2. Kepala Tanaman

Membawahi :

- a. Kepala Tebang dan Angkut
- b. Kepala Litbang
- c. Sinder Kebun Kepala (Kepala Tanaman Rayon)
- d. Kepala Kebun Wilayah

Fungsi dan tanggung jawab :

- a. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bidang tanaman dari membuka lahan, pengadaan bibit sampai panen.
- b. Mengawasi program kerja tanaman.
- c. Mempertanggungjawabkan areal dan produksi di bagian tanaman kebun.

3. Kepala Administrasi Keuangan dan Umum

Membawahi :

- a. Staf HAK (Hukum Agraria dan Ketenagakerjaan)
- b. Staf Keuangan dan Umum
- c. Staf Perbukuan
- d. Staf Gudang

Fungsi dan tanggung jawab :

- a. Mengkoordinasi bagian SDM (Sumber Daya Manusia).
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembukuan.

- c. Membuat dan mengawasi Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan program kerja.
 - d. Mengkoordinasi kegiatan bagian gudang material dan gudang gula.
 - e. Mengendalikan biaya operasional perusahaan.
4. Kepala Instalasi
- Membawahi :
- a. Masinis
 - b. Bagian Transportasi
 - c. Dok Loko Remise
 - d. Bagian OBM (Onder hood Board Material)
- Fungsi dan tanggung jawab :
- a. Mempertanggungjawabkan kegiatan operasional bagian teknik mulai dari persiapan peralatan-peralatan di pabrik termasuk maintenance.
5. Kepala Pabrikasi
- Membawahi :
- a. Ajunt Kepala Pengolahan
 - b. Ahli Gula (Chemiker)
- Fungsi dan tanggung jawab :
- a. Membantu pengolahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengolahan.
 - b. Mengkoordinasi penyusunan anggaran dan program kerja.
 - c. Sebagai koordinator operasional timbangan tebu lori dan truk.
 - d. Sebagai ketua pelaksanaan pemantauan limbah cair.

2.5 Aspek Personalia PG. Semboro

2.5.1 Status Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan

Dalam suatu perusahaan, untuk aktivitasnya tidak lepas dari keberadaan tenaga kerja. PG. Semboro sebagai salah satu unit produksi dari PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) di tuntut untuk mengadakan pengelolaan tenaga kerja yang efektif dan seefisien mungkin. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan tenaga

kerja atau karyawan semaksimal mungkin, mulai dari penerimaan, pemanfaatan dan pembinaannya.

Berdasarkan sifat hubungan kerja dengan perusahaan, karyawan PG. Semboro terdiri dari dua kelompok besar yaitu :

1. Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tentu dimana pada saat di mulainya hubungan kerja di dahului dengan masa percobaan maksimal 3 (tiga) bulan.

2. Karyawan Tidak Tetap

Karyawan tidak tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, dimana pada saat di mulainya hubungan kerja tidak di dahului dengan masa percobaan.

Karyawan tidak tetap terdiri dari :

a. Karyawan Kampanye

Yaitu karyawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari permulaan tebu di tebang sampai di angkut dan di timbang, pekerjaan dipenggilingan tebu dan pekerjaan di dalam pabrik sampai dengan penumpukan gula dalam gudang.

b. Karyawan Musiman Tetap

Yaitu karyawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari permulaan pembukaan tanah, persiapan tanam dan pemeliharaan tebu pabrik gula sampai tebu di tebang.

c. Karyawan Musiman Tebang

Yaitu karyawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari permulaan tebu pabrik gula di tebang sampai di angkut dan di timbang, termasuk pekerjaan persiapan tebang sampai pemuatan tebu di atas alat angkut.

d. Karyawan Musiman Lain

Yaitu karyawan yang bekerja di sekitar emplasemen namun tidak ada hubungannya secara langsung dengan penggilingan tebu.

2.5.2 Jumlah Karyawan PG. Semboro

Posisi sampai dengan akhir bulan Pebruari 2001 (LMG), jumlah total pegawai atau karyawan PG. Semboro adalah 995 orang, yang terdiri dari :

- Karyawan staf	= 47 orang
- Karyawan tetap :	
- Bulanan	= 804 orang
- Harian	= -
- KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu)	= 144 orang
- Pegawai musiman tetap :	
- Bulanan	= -
- Harian	= -
Jumlah	= 995 orang

Untuk keterangan yang lebih lengkap tentang jumlah karyawan dan golongan-golongan karyawan yang ada di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Semboro dapat dilihat pada lampiran 5.

2.5.3 Hak-hak Karyawan

Dalam suatu perusahaan, sebagai imbalan dari semua yang dikerjakan maka karyawan mempunyai hak. Adapun hak-hak karyawan yang ada pada PG. Semboro adalah :

1. Gaji Karyawan

Karyawan menerima gaji pokok yang besarnya di sesuaikan dengan pangkat atau golongannya. Komponen gaji lainnya adalah tunjangan pokok yang terdiri dari tunjangan keluarga dan tunjangan struktural yang besarnya didasarkan pada keaktifan masuk kerja dan sesuai dengan golongan. Selain itu untuk jabatan tertentu, biasanya kepala bagian juga diberikan tunjangan fungsional yang berupa tunjangan jabatan dan tunjangan representasi. Tunjangan-tunjangan tersebut besarnya didasarkan pada gaji pokok yang persentasenya telah ditetapkan oleh menteri.

2. Santunan Sosial

Karyawan mendapat santunan sosial berupa :

- Bantuan sewa rumah = besarnya ditetapkan sesuai golongan

- b. Bantuan air = besarnya 10 % dari sewa rumah
- c. Bantuan listrik = besarnya 25 % dari sewa rumah
- d. Bantuan bahan bakar = besarnya 15 % dari sewa rumah

3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang diberikan untuk pegawai terdiri dari :

a. Perawatan kesehatan

Perawatan kesehatan dan pengobatan bagi karyawan dan batuhnya di tanggung oleh perusahaan. Yang dimaksud batih di sini adalah istri dan anak yang sah menjadi tanggungannya.

b. Biaya cuti

1. Cuti tahunan dan tunjangannya

Karyawan yang bekerja 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan yang diberikan untuk 12 hari dengan ketentuan karyawan yang bersangkutan memperoleh tunjangan sebesar 40 % gaji.

2. Cuti panjang dan tunjangannya

Karyawan yang bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti panjang selama 1 bulan (30 hari) termasuk hari libur. Karyawan yang bersangkutan memperoleh tunjangan sebesar satu bulan gaji.

3. Cuti hamil

Cuti hamil hanya diberikan kepada karyawan wanita.

c. Bantuan pemondokan

Bantuan ini diberikan bagi anak karyawan yang sekolah di SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi yang terpaksa mondok di luar tempat kerja orang tua atau karyawan.

d. Bantuan Kematian

4. Tunjangan Pelaksanaan Tugas, yang terdiri dari :

- a. Biaya perjalanan dinas (dalam atau luar negeri)
- b. Tunjangan pisah keluarga

- c. Tunjangan pendidikan (dalam atau luar negeri) diberikan bagi karyawan yang bersekolah lagi atas usulan dari perusahaan.
 - d. Biaya pindah
 - e. Tunjangan mewakili
5. Santunan Khusus, yang terdiri dari :
- a. Penghargaan masa kerja 25 tahun, mendapat santunan 5 x gaji.
 - b. Penghargaan masa kerja 30 tahun, mendapat santunan 2 x gaji.
 - c. Penghargaan khusus
Penghargaan khusus berupa tantium diberikan pada karyawan apabila perusahaan memperoleh laba. Besarnya tantium di atur sendiri oleh menteri.
6. Pembinaan dan Pengembangan Karyawan
Dalam pembinaan karyawan, perusahaan atau direksi menyelenggarakan dalam bentuk:
- a. Pembinaan jasmani dan rohani
 - b. Pembinaan disiplin karyawan
- Sedangkan dalam hal pengembangan karyawan, direksi atau perusahaan menyelenggarakan dalam bentuk :
- a. Seminar loka karya
 - b. Peningkatan produktifitas
 - c. Meningkatkan keterampilan kerja, misalnya las dan bubut bekerja sama dengan BLK Singosari
7. Mutasi dan Perpindahan
Mutasi merupakan bagian dari pembinaan karir karyawan yang dilakukan secara menyeluruh dengan tidak dikaitkan pada promosi atau hukuman disiplin, tetapi merupakan suatu tindakan pimpinan perusahaan demi kepentingan perusahaan maupun karyawan yang bersangkutan.
Mutasi dapat berupa :
- a. Mutasi intern
Mutasi intern yaitu mutasi antar jabatan dalam perusahaan yang dilakukan dalam rangka pemberian kesempatan yang sama, penyegaran,

penambahan pengetahuan dan sebagai tindakan preventif dalam pengamanan personel, berlaku untuk golongan IA-IIID.

b. Mutasi ekstern

Mutasi ekstern atau mutasi antar wilayah yaitu mutasi antar pabrik gula tetapi masih dalam unit PT Perkebunan Nusantara XI (Persero). Perpindahan antar perusahaan dilakukan dalam rangka pemenuhan atau pengisian tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan perusahaan. Berlaku untuk golongan IIIA-IVD.

8. Pemberhentian Karyawan

Pemberhentian karyawan perusahaan berdasarkan predikatnya terdiri dari :

a. Pemberhentian dengan hormat, dapat terjadi dengan ketentuan :

1. Atas permintaan sendiri
2. Telah mencapai batas usia pensiun
3. Adanya penyederhanaan organisasi perusahaan
4. Meninggal dunia

b. Pemberhentian tidak hormat, dapat terjadi jika :

1. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan yang menentang negara dan pemerintah.
2. Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan jabatan.
3. Melakukan perbuatan atau pelanggaran berat terhadap larangan-larangan yang ditetapkan perusahaan.

9. Batas Usia Pensiun

Batas usia pensiun bagi karyawan adalah 55 tahun, kecuali untuk jabatan tertentu (misal Administratur) dapat diperpanjang dengan Surat Keputusan Direksi yaitu sampai usia 57 tahun.

Besarnya uang pensiun karyawan ditetapkan atas dasar :

- a. Besarnya dasar pensiun
- b. Banyaknya masa kerja efektif

Hak atas pensiun berakhir jika :

- a. Pensiunan atau karyawan telah meninggal dunia
- b. Hak pensiun gugur



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

3.1.1 Diskripsi (Gambaran) Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari kegiatan program mata kuliah. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro yang terletak di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, pada bagian Administrasi Keuangan dan Umum. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 12 April 2001, dengan jam kerja efektif 6 hari yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kegiatan yang dilaksanakan selama Praktek Kerja Nyata adalah untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), mengingat mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar Ahli Madya Perpajakan. Mahasiswa yang melaksanakan program Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah mereka yang telah menempuh minimal 100 SKS. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) kami diterima baik oleh Pimpinan PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro pada tanggal 12 Maret 2001.

Tanggal 12 Maret – 17 Maret 2001 merupakan minggu pertama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro yang diawali dengan sambutan Kepala Seksi Personalia selaku penanggung jawab sumber daya manusia, dilanjutkan dengan perkenalan pada para pegawai PG. Semboro. Dalam minggu ini juga mendapatkan penjelasan tentang perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan lingkungan pabrik.

Minggu kedua dimulai tanggal 19 Maret – 24 Maret 2001. Pada minggu ini mulai dilakukan pencarian data dan informasi yang sesuai dan berhubungan dengan laporan yang diajukan yaitu Pelaksanaan Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PTPN XI (Persero) PG. Semboro yang didapat pada bagian Administrasi Keuangan dan Umum.

Minggu ketiga di mulai tanggal 27 Maret – 31 Maret 2001. Kegiatan yang dilakukan masih terfokus pada pencarian data dan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan PPh pasal 21 yang harus dilaksanakan oleh pegawai tetap PG. Semboro serta tata cara penyampaian dan penyetoran pajak yang terutang menurut penghitungan yang ada pada Surat Pemberitahuan (SPT) dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada minggu ini juga mendapatkan penjelasan tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Formulir 1721- A1.

Minggu keempat merupakan minggu terakhir dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN). Pada minggu ini dilakukan konsultasi dengan pembimbing dari PG. Semboro dan supervisor yang datang berkunjung untuk mengetahui kegiatan mahasiswa selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang merupakan utusan dari fakultas sekaligus memohonkan diri kepada perusahaan bahwa pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa harus berakhir pada tanggal 12 April 2001. Untuk lebih lanjutnya jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> - Diterima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro yang diwakili oleh Bapak H.M. Aboezairi selaku Kabag. AKU - Konsultasi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan pembimbing dari perusahaan. - Pengarahan tentang administrasi yang ada pada bagian AKU.
Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat penjelasan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian pada PG. Semboro. - Mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan gula dan aspek personalia PG. Semboro. - Membantu merekapitulasi PPh pasal 21.

Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari data mengenai pelaksanaan penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap. - Memperoleh penjelasan mengenai daftar gaji pegawai. - Memperoleh penjelasan tentang tata cara penyetoran dan pelaporan SSP. - Mengecek kelengkapan data yang diperlukan dalam pembuatan laporan.
Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konsultasi akhir dengan pembimbing di PG. Semboro. - Mengajukan laporan untuk direvisi oleh pembimbing di PG. Semboro. - Pelepasan Praktek Kerja Nyata dari PTP Nusantara XI (persero) PG. Semboro Kabupaten Jember.

3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Definisi Pajak menurut :

1. Mr. Dr. NJ. Peldmonn (1949;3) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.
2. Dr. Soeparman Soemahamidjaya (1964;4), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Prof. Dr. Rahmat Soemitro, S.H (1984;5), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

b. Kriteria pajak berdasarkan Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1984;6)

1. Adanya undang-undang, artinya pajak tersebut dipungut berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah);
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah;
5. Pajak selain berfungsi “budgeter” juga berfungsi “regulated”.

c. Pajak penghasilan (Berita pajak 1996;41) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia.

d. Pajak penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo (1997;87) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan / jabatan jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam UU PPh No.10 tahun 1994 pasal 21.

e. Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung (Mardiasmo, 1995;87).

f. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut keputusan Dirjen pajak No. 02/PJ/1995 yang diperbarui dengan keputusan Dirjen pajak No. 30/PJ/1995 yang dimaksud obyek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan PPh pasal 21 (Achmad Chahyono / Mohammad F. Husain, 1997;220). Yang termasuk obyek pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantium, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
 4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lainnya.
 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
- g. Tata Cara Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
- Tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap menurut Mardismo 1997;98 adalah :
1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan dikurangi :
 - a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,- setahun / Rp. 108.000,- sebulan.
 - c. Iuran yang melekat pada gaji, pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran tabungan hari tua / Tunjangan Hari Tua (THT), kepada badan penyelenggara Jamsostek,

kecuali kepada badan penyelenggara Taspen yang dibayarkan oleh pegawai.

2. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan nettanya dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya. Sesuai keputusan MK. No. 361/KMK 04/1998 tanggal 27 Juli 1998 PTKP yang diperbolehkan per tahun adalah :

Wajib pajak sendiri	= Rp. 2.880.000,-
Status Kawin	= Rp. 1.440.000,-
Tunjangan istri bekerja	= Rp. 2.880.000,-
Tunjangan anak maksimal 3 orang @	= Rp. 1.440.000,-

3. Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif yang terdapat pada pasal 17 dengan lapisan penghasilan kena pajak sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Rp. 0,- s/d Rp. 25.000.000,-	10%
Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	15%
Diatas Rp. 50.000.000,-	30%

Contoh pengetrapan tarif pasal 17

- a. Tuan Darma pada tahun 2000 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp. 26.023.600,-. Besarnya pajak yang harus dibayar atau terutang oleh Tuan Darma adalah :

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 26.023.000,-
(dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh)	
Pajak penghasilan yang harus dibayar:	
10% x Rp. 25.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 1.023.000,-	Rp. 153.450,- +
	Rp. 26.53.450,-

- b. PTPN XI (Persero) PG. Semboro pada tahun 2000 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp. 509.680.000,-. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh PTPN XI (Persero) PG. Semboro adalah :

PKP	Rp. 509.680.000,-
PPh yang harus dibayar	
10% x Rp. 25.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 25.000.000,-	Rp. 3.750.000,-
30% x Rp. 459.680.000,-	<u>Rp. 137.904.000,- +</u>
	Rp. 144.154.000,-

h. Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Menurut Waluyo (1999;20) pembayaran dan penyetoran pajak dapat melalui dua cara yaitu memakai jasa kantor pos dan giro dan jasa bank persepsi melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan pelaporan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-undang KUP No. 9 (1994;3) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang, baik masa ataupun tahunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-undang KUP No. 9 (1994;3) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. Untuk SSP disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, jika terdapat keterlambatan atau kekurangan maka wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak yang belum disetorkan, sedangkan untuk SPT Masa harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. SPT Tahunan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Atas keterlambatan tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- untuk SPT Masa dan Rp. 50.000,- untuk SPT Tahunan.

i. Pelaksanaan Penghitungan Pemptongan PPh Pasal 21 di PG. Semboro

Menghitung dan merekap PPh pasal 21 datanya diperoleh dari daftar upah

pegawai bulanan tetap golongan IA s/d IID dan golongan IIIA s/d IVD.
 Penghitungan gaji pegawai bulanan tetap:

a. Perhitungan Gaji Pegawai Golongan IA s/d IID

1. Merakapitulasi Jumlah Jam Lembur Pegawai Bulanan Tetap

Menghitung dan merekap jumlah jam lembur pegawai bulanan golongan IA s/d IID tiap-tiap bagian kedalam blangko madel AU 16. Masing-masing bagian menyerahkan rekapitulasi jumlah jam lembur model AU 16 kepada bagian personalia yaitu bagian gaji. Blangko model AU 16 dapat dilihat pada lampiran 11, antara lain berisi :

- a). NAMA : diisi nama pegawai PG.Semboro
 Contoh : M. Sony Fonda
- b). BAGIAN : diisi bagian pegawai bersangkutan
 Contoh : Administrasi Keuangan dan Umum
- c). REGESTER : diisi nomor registrasi
 Contoh : 4534
- d). BULAN : diisi bulan pada saat pegawai kerja lembur
 Contoh : Mei
- e). TANGGAL : diisi tanggal pada saat pegawai kerja lembur
 Contoh : 3 Mei
- f). M/D : diisi keterangan waktu saat mulai kerja lembur
 Contoh : Jam 15.00 BBWI
- g). S/D : diisi keterangan waktu saat selesai kerja lembur
 Contoh : Jam 17.00 BBWI
- h). JUMLAH : diisi jumlah jam lembur yang diperoleh (SD-MD)
 Contoh : 17.00 - 15.00 = 2 jam
- i). BIASA : diisi hasil perkalian jam lembur dengan faktor pada hari kerja biasa sesuai dengan ketentuan perhitungan jumlah jam lembur pegawai bulanan tetap PG. Semboro
 Contoh : Jam lembur = 2 jam

Perhitungan jumlah jam lembur:

Jam lembur		faktor	=	jumlah
1 jam (pertama)	x	1,5	=	1,5
1 jam (sisanya)	x	2	=	2 +
2 jam lembur				<u>3,5</u>

j). MINGGU : diisi hasil perkalian jam lembur dengan faktor pada hari minggu sesuai dengan ketentuan perhitungan jumlah jam lembur pegawai bulanan tetap.

Contoh : tanggal 14 Mei 2000 adalah hari Minggu pegawai yang bernama M. Sony Fonda bagian Administrasi Keuangan dan Umum. Lembur mulai jam 07.00 sampai dengan jam 18.00 maka jam lembur adalah $18.00 - 07.00 = 9$ jam

Perhitungan jumlah jam lembur :

Jam lembur		faktor	=	jumlah
7 jam (pertama)	x	2	=	14
1 jam (kedua)	x	3	=	3
1 jam (sisanya)	x	4	=	4 +
9 jam lembur				<u>21</u>

k). BESAR : diisi sama dengan perhitungan hari Minggu

l). URAIAN

PEKERJAAN : diisi sesuai dengan jenis pekerjaan lembur dari masing-masing bagian

m). PARAF RC : diisi sesuai paraf pengawas masing-masing bagian

n). JUMLAH

FAKTOR

LEMBUR

: diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan kolom BIASA, MINGGU, dan BESAR. Kemudian dikalikan dengan upah lembur per jam

o). DIBUAT : diisi oleh pembuat blangko model AU 16 yaitu juru tulis masing-masing bagian

p). DIKETAHUI : diisi oleh kepala bagian sesuai bagian masing-masing pegawai

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Jam Lembur Model AU 16

PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro

NAMA : M. Sony Fonda

BAGIAN : Administrasi Keuangan dan Umum

REGEST : 4534

Tgl	M/D	S/D	JUMLAH	BIASA	MINGGU	BESAR	URAIAN PEKERJAAN	PARAF RC
1.								
2.								
3.	15.00	17.00	2	3,5	-	-	-	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	07.00	18.00	9	21	-	-	-	
15.								
JUMLAH			FAKTOR				=	JAM x Rp
LEMBUR								

DIBUAT PERINTAH LEMBUR DISETUJUI DIKETAHUI

Sumber : PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro

2. Daftar Gaji Pegawai Bulanan Tetap Golongan IA s/d IID

Perhitungan gaji pegawai bulanan tetap. Rekapitulasi daftar gaji yang dibuat setiap bulan dapat dilihat pada lampiran 12 yang berisi :

- a. NO : diisi sesuai nomor urut
- b. N.I.K : diisi N.I.K pegawai yang bersangkutan
- c. NAMA PEGAWAI : diisi nama pegawai PG. Semboro
Contoh : M. Sony Fonda
- d. GOL / SKALA : diisi sesuai golongan pegawai
- e. JML JAM LEMBUR : diisi jumlah jam lembur apabila pegawai melakukan kerja lembur yang datanya diperoleh dari blangko AU 16
Contoh : 24,5 jam
- f. STATUS PAJAK : diisi sesuai keluarga yang ditanggung
Contoh : K/2
- g. GAJI POKOK : diisi sesuai ketentuan PG. Semboro tentang daftar gaji pegawai golongan IA s/d IID
Contoh : Rp. 500.000,-
- h. TUNJANGAN
1. Tunjangan Khusus : diisi sesuai golongan
Contoh : Rp. 100.000,-
 2. Kompensasi Tugas : diisi sesuai tugas masing-masing pegawai
Contoh : Rp. 75.000,-
 3. Sewa Rumah : diisi menurut ketentuan santunan sosial sesuai golongan pegawai
Contoh : Rp. 80.000,-
 4. Listrik, Air dan Bahan Bakar : diisi sesuai data tunjangan santunan sosial

Listrik	= 25% x Sewa Rumah
Air	= 10% x Sewa Rumah
Bahan Bakar	= 15% x Sewa Rumah
- Contoh : Rp. 40.000,-

- i. IURAN PENSIUN : diisi iuran pensiun yaitu $4,85\% \times$ gaji pokok yang merupakan beban perusahaan
- j. JAMSOSTEK : diisi iuran jamsostek yaitu $4,54\% \times$ gaji pokok yang merupakan beban perusahaan
- k. PPh 21 : diisi pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan setiap pegawai dan menjadi tanggungan perusahaan
- l. UANG LEMBUR : diisi hasil perkalian antara jumlah jam lembur dengan upah lembur per jam
- Contoh : Jumlah jam lembur = 24,5 jam
 Upah lembur per jam = Rp. 5.000,- x
 Uang Lembur = Rp. 122.500,-
- m. GAJI KOTOR : diisi hasil penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan dan uang lembur
- n. JUMLAH POTONGAN: diisi sesuai dengan data yang terdapat pada daftar potongan gaji pegawai bulanan tetap termasuk iuran pensiun sebesar 6% dan jamsostek 2% dari gaji pokok yang menjadi tanggungan pegawai

Contoh Penghitungan PPh 21

M. Sony Fonda kerja di PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro dengan gaji sebulan Rp. 500.000,-. Selain gaji M. Sony Fonda mendapat tunjangan khusus sebesar Rp. 100.000,-, tunjangan kompensasi tugas sebesar Rp. 75.000,- dan tunjangan sewa rumah Rp. 80.000,- serta tunjangan listrik, air dan bahan bakar sebesar Rp. 40.000,-. Disamping itu M. Sony Fonda mendapat uang lembur sebesar Rp. 122.500,-. PTP Nusantara (Persero) PG. Semboro menanggung iuran pensiun M. Sony Fonda sebesar 4,85% dan jamsostek 4,54 % dari gaji pokok. Sedangkan M. Sony Fonda setiap bulannya membayar iuran pensiun sebesar 6% dan jamsostek 2% dari gaji pokok yang menjadi tanggungannya. M. Sony Fonda sudah kawin dan mempunyai 2 anak.

Penghitungan PPh pasal 21:

Gaji sebulan		Rp. 500.000,-
Tunjangan Khusus		100.000,-
Kompensasi Tugas		75.000,-
Sewa Rumah		80.000,-
Tunjangan Listrik, air dan Bahan Bakar		40.000,-
Uang Lembur		<u>122.500,- +</u>
Penghasilan Bruto		Rp. 917.500,-
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp. 917.500,-	= Rp. 45.875,-	
2. Iuran Pensiun		
6% x Rp. 500.000,-	= Rp. 30.000,-	
3. Jamsostek		
2% x Rp. 500.000,-	= <u>Rp. 10.000,- +</u>	
		Rp. 85.875,- -
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 831.625,-
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp 831.625,-		Rp. 9.979.500,-
4. PTKP Setahun		
Untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,-	
Tambahkan WP kawin	Rp. 1.440.000,-	
Tambahkan 2 orang anak	<u>Rp. 2.880.000,- +</u>	
		Rp. 7.200.000,- -
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 2.779.500,-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 2.779.000,-

(dibulatkan penuh hingga ribuan kebawah)

PPh pasal 21 : 10% x Rp. 2.779.000,- = Rp. 277.900,-

PPh pasal 21 sebulan : Rp. 277.900,- : 12 = Rp. 23.158,33

b. Perhitungan Gaji Pegawai Bulanan Tetap (Staff) Golongan IIIA s/d IVD

Perhitungan gaji pegawai bulanan tetap (staff) golongan IIIA s/d IVD, rekapitulasi daftar gaji setiap bulan dapat dilihat pada lampiran 13 yang berisi :

1. NO. URUT : diisi sesuai nomor urut pegawai
2. N.I.K : diisi N.I.K pegawai yang bersangkutan
3. NAMA PEGAWAI : diisi nama pegawai yang bersangkutan
4. STATUS PAJAK : diisi sesuai keluarga yang ditanggung
5. GOL / SKALA : diisi sesuai golongan pegawai
6. JUMLAH HADIR : diisi jumlah hadir pegawai
7. GAJI : diisi sesuai ketentuan PG. Semboro tentang gaji pegawai (staff)
8. TUNJANGAN
 - a. STRUKTURAL : diisi sesuai golongan pegawai
 - b. FUNGSIONAL : diisi sesuai jabatan pegawai
 - c. KOMUNIKASI : diisi sesuai jabatan pegawai
 - d. SEWA RUMAH : diisi menurut ketentuan santunan sosial sesuai golongan pegawai
 - e. Listrik, Air dan Bahan Bakar : diisi sesuai data tunjangan santunan sosial

$$\begin{aligned} \text{Listrik} &= 25\% \times \text{Sewa Rumah} \\ \text{Air} &= 10\% \times \text{Sewa Rumah} \\ \text{Bahan Bakar} &= 15\% \times \text{Sewa Rumah} \end{aligned}$$
 - f. IURAN PENSIUN : diisi iuran pensiun yaitu $4,85\% \times$ gaji pokok yang merupakan beban perusahaan
 - g. JAMSOSTEK : diisi iuran jamsostek yaitu $4,24\% \times$ gaji pokok yang merupakan beban perusahaan
 - h. PPh 21 : diisi pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan setiap pegawai dan menjadi tanggungan perusahaan

- i. GAJI KOTOR : diisi hasil penjumlahan dari gaji pokok dan tunjangan.
- j. JUMLAH POTONGAN : diisi sesuai dengan data yang terdapat pada daftar potongan gaji pegawai bulanan tetap termasuk iuran pensiun sebesar 6% dan jamsostek 2% dari gaji pokok yang menjadi tanggungan pegawai.

Contoh Penghitungan PPh 21

Budi sudah kawin memiliki 1 orang anak. Budi merupakan pegawai tetap pada PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro dengan gaji sebulan Rp. 1.200.000,-. Selain gaji Budi mendapatkan tunjangan struktural Rp. 100.000,-, tunjangan fungsional Rp. 150.000,-, tunjangan komunikasi Rp. 200.000,-, sewa rumah Rp. 150.000,- (untuk pegawai golongan IIIA s/d IVD) dan tunjangan listrik, air serta bahan bakar masing-masing sebesar 25%, 10% dan 15% dari sewa rumah. Budi menempati rumah dinas sehingga ia tidak mendapat tunjangan sewa rumah, listrik dan air. PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro masuk program pensiun dan jamsostek untuk pegawainya. Setiap bulannya PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro menanggung iuran pensiun dan jamsostek sebesar 4,85% dan 4,24% dari gaji pokok (pegawai golongan IIIA s/d IVD). Sedangkan Budi membayar iuran pensiun 6% dan jamsostek 2% dari gaji pokok yang menjadi tanggungannya setiap bulan. PPh ditanggung pemberi kerja.

Penghitungan PPh pasal 21

Gaji sebulan	Rp. 1.200.000,-
Tunjangan Struktural	100.000,-
Tunjangan Fungsional	150.000,-
Tunjangan Komunikasi	200.000,-
Tunjangan Bahan Bakar	
15% x Rp. 150.000,-	22.500,- +
Penghasilan Bruto	Rp. 1.672.500,-

Pengurangan

1. Biaya Jabatan

5% x Rp. 1.672.500,- Rp. 83.625,-

2. Iuran Pensiun

6% x Rp. 1.200.000,- Rp. 72.000,-

3. Jamsostek

2% x Rp. 1.200.000,- Rp. 24.000,- +

Rp. 179.625,- -

Penghasilan netto sebulan

Rp. 1.492.875,-

Penghasilan netto setahun

12 x Rp. 1.492.875,- Rp. 17.914.500,-

4. PTKP setahun

Untuk WP sendiri Rp. 2.880.000,-

Tambahan status kawin 1.440.000,-

Tambahan 1 orang anak 1.440.000,- +

Rp. 5.760.000,- -

PKP

Rp. 12.154.500,-

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 12.154.000,-

(dibulatkan hingga ribuan penuh kebawah)

PPh pasal 21

10% x Rp. 12.154.000,- = Rp. 1.215.400,-

PPh pasal 21 sebulan

Rp. 1.215.400,- : 12 = Rp. 101.283,33

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya

PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro merupakan wajib pajak badan yang mempunyai NPWP 1.001.174.9.266. Sebagai wajib pajak badan PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro juga merupakan pemberi kerja yang harus melaksanakan semua kewajibannya kepada negara, salah satunya melaksanakan pemotongan pajak atas gaji pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Digital Repository Universitas Jember

Sampai saat ini PTP Nusantara XI (persero) PG. Semboro telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, meskipun penanganan pajaknya tidak dikuasakan pada pihak lain. Artinya, perhitungan dan pengisian SPT Masa serta SPT Tahunan dilaksanakan oleh pegawainya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan – penyuluhan yang diberikan Kantor Penyuluhan Pajak (KPP) dan buku petunjuk dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Jember. Hal ini dibuktikan bahwa PG. Semboro tidak pernah dikenakan sanksi, baik administrasi ataupun denda oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam 3 tahun terakhir PG. Semboro telah membayar pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetapnya sebesar Rp. 273.505.005,-. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

PPh pasal 21 tahun 1998	= Rp. 119.714.298,-
PPh pasal 21 tahun 1999	= Rp. 110.743.285,-
PPh pasal 21 tahun 2000	= Rp. 43.047.422,-
Total	= Rp. 273.505.005,-

Dalam pelaksanaan laporan ataupun penyeteroran PPh, PG. Semboro menggunakan NPWP PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro yang dilakukan pada bank persepsi yang telah ditunjuk yaitu Bank Mandiri cabang Jember. PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro selalu menyampaikan dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Adapun SPT yang disampaikan meliputi SPT Masa pasal 23, SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap melalui formulir 1721 atas nama PTP Nusantara (Persero) PG. Semboro.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga di dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PTP Nusantara XI (Persero) PG. Semboro, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini masih jauh dari sempurna sebagai suatu karya ilmiah. Penulis juga menyadari bahwa didalam uraian atau karya ilmiah yang telah penulis terangkan dalam bentuk laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, disini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk pembuatan karya ilmiah yang lebih sempurna.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, dan semoga dapat membantu bagi siapa saja yang ingin melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) maupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Cahyono, Mohammad F. Husain; *Perpajakan*, Cetakan Pertama, 1995, Yogyakarta, UPPAMP, YKPN
- Departemen Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak; *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21*, 1998, Jakarta, Berita Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak; *Dasar-Dasar Pengetahuan Pajak*, 1995, Jakarta, Berita Pajak.
-; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 *Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*.
-; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*.
-; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 *Tentang PPh (Pajak Penghasilan)*.
-; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 *Tentang PPh (Pajak Penghasilan)*.
- Mardiasmo; *Perpajakan*, Edisi V, 1997, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- R. Santoso Brotodiharjo; *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan ke-XI, 1984, Jakarta, PT. Eresco.
- Waluyo; *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Pertama, 1999, Jakarta, Salemba Empat.

Nomor : AC-INSIP/01.026

Surabaya, 1 Maret 2001

Yth. DEKAN FAK.ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
Jalan Kalimantan - Kampus Tegalboto
di - Jember



IJIN PRAKTEK KERJA NYATA

Berdasarkan surat Saudara nomor 476/J25.I.2/PP.9/II/2001 tanggal 12 Pebruari 2001, dengan ini kami beritahukan bahwa Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) memberi ijin kepada :

1. Rini Kusnawati NIM : 98 - 1011
2. Elmi Muzayyanah NIM : 98 - 1093
3. Nanik Irawati NIM : 98 - 1107

Manasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, untuk melaksanakan praktek kerja nyata tentang perpajakan yang berhubungan langsung dengan ketenagakerjaan di FT Perkebunan Nusantara XI (Persero) - PG Semboro, Tanggul.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Waktu yang diberikan adalah mulai tanggal 12 Maret s.d. 12 April 2001.
2. Pepondokan untuk siswa tidak disediakan oleh PG Semboro.
3. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut tidak menjadi tanggungan PG Semboro.
4. Siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengambil data yang berhubungan dengan keuangan.
5. Yang bersangkutan harus mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PG Semboro.
6. Setelah selesai melaksanakan kerja praktek selambat-lambatnya 2 (dua) bulan mahasiswa tersebut wajib mengirimkan laporannya yang telah diketahui oleh Administrator PG Semboro serta disahkan oleh Guru Pembimbing kepada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) dalam hal ini ke Bagian Sumber Daya Manusia, Jalan Merak nomor 1, Surabaya.

Ditakikan untuk perhatiannya.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)



Tinjauan untuk
Administrator PG Semboro

SOENARRIYONO BS
Kabag Sumber Daya Manusia

Dit. 01



Surat Tugas

Nomer : 84 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Rini Kusnawati	98 - 1011	Ketua
02	Elhai Muzayyanah	98 - 1093	Wakil ketua
03	Nanik Irawati	98 - 1107	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PTPN XI (PERSERO) PG Sembora Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 MAR 2001
Dekan,



Des. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

SURAT KETERANGAN

No : XX-SURKET/01.004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ratono , BSc
Jabatan : Administratur PG. Semboro

Menerangkan bahwa mahasiswa D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember dibawah ini :

<u>N A M A</u>	<u>N I M</u>
Nanik Irawati	98-1107
Rini Kusnawati	98-1011
Elmi Muzayyanah	98-1093

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PG. Semboro dari tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan 12 April 2001 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Semboro, 12 April 2001

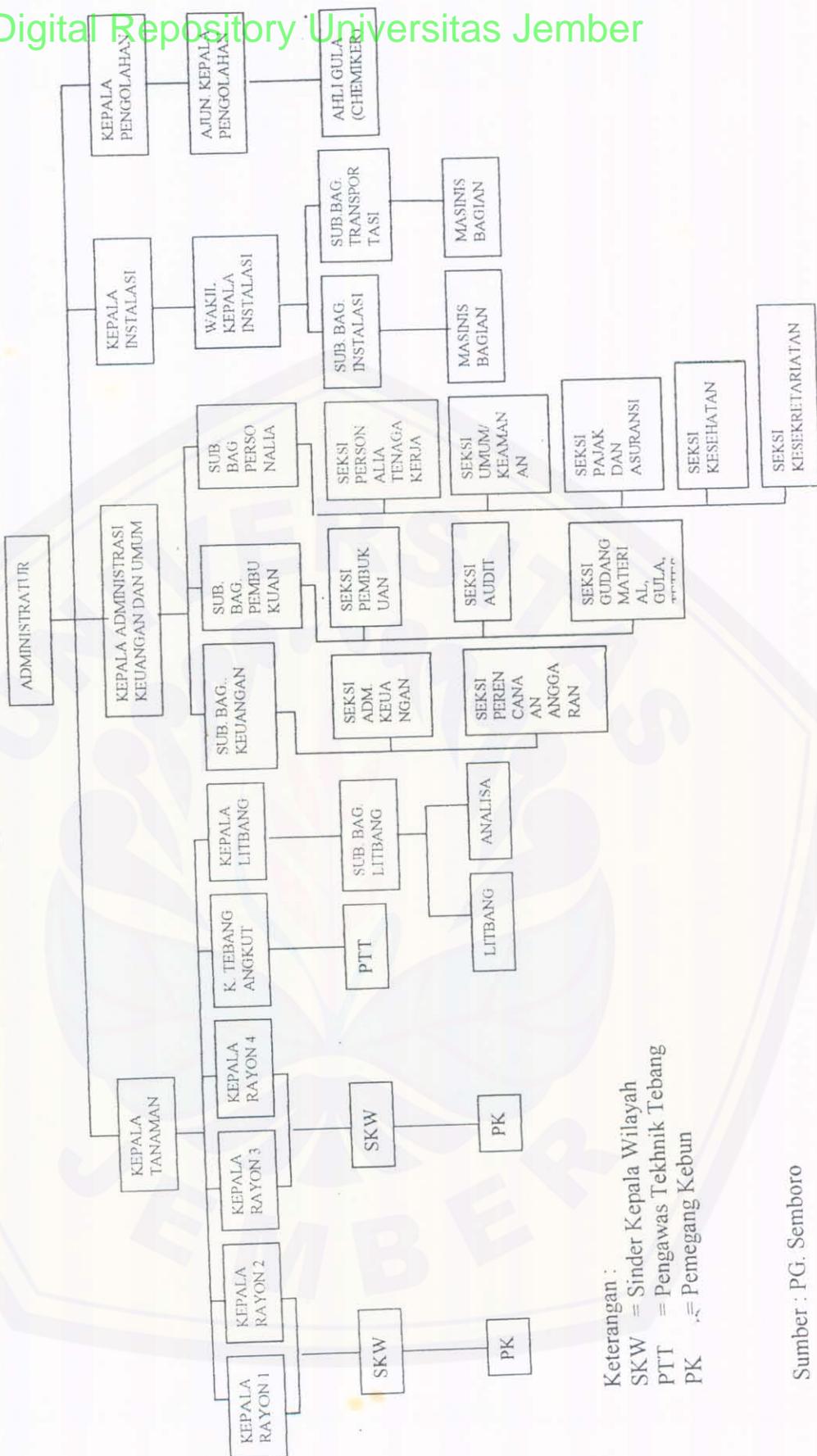
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)
PG. SEMBORO "



Ratono
Ratono, BSc
Administratur

STRUKTUR ORGANISASI PG. SEMBORO

Lampiran 4



Keterangan :
 SKW = Sinder Kepala Wilayah
 PTT = Pengawas Teknik Tebang
 PK = Pemegang Kebun

Sumber : PG. Semboro

PT PERBUKUAN NUSANTARA XI (PERSERO)

LAPORAN POSISI TENAGA KERJA

FABRIK GULA SENGOK

(Akhir) Bulan PERIODE 2001

U r a i a n	PEGAJAI		PEGAJAI GOL 1A-11D		PEGAJAI MUSIMAN TETAP		KMT	JUMLAH PEG.		JUMLAH PEG. + Tambah & Kurang		Jml. Peg. yg diam di Perda
	11A-11D	Bulanan	Harian	Bulanan	Harian	Jumlah		Harian	Jumlah	Harian	Jumlah	
POSISI MENURUT BAGIAN	10	148					16	174	176	(2)	174	70
- TATA USAHA KEUANGAN	25	151					48	224	226	(2)	224	70
- TANAMAN		138					20	158	156	2	159	70
- TERANG & ANGKUT	7	267					27	301	302	(1)	301	70
- INSTALASI	5	12					11	18	18	(1)	17	70
- FABRIKASI							11	85	85		85	70
- TRANSPORT							22	36	36		36	70
- PELAYAN TEKNIK												70
- HONOR												70
JUMLAH BULAN INI :	47	804		804			144	995	999	(4)	995	320
Jumlah bulan ybl :	47	809		809			144	999	996	6	999	320
Tambah / Kurang :		(5)		(5)				(4)		(10)	(4)	

PT PERKEBUNGAN NISANTARA M (PERSERO) LAMPUR POSISI TENAGA KERJA KHR / Bulan FEBRUARI 2001
 PABUK GILA SEMBRO

C r a i a n	PEGAHAL GOL	PECAHAI GOL	PECAHAI GOL LA-III D	PEGAHAL MGSINAN TETAP	NSWT	JUMLAH		+ Tambah * Kurang	WAKTU DITAMBAH	Jumlah
						BLN. INI	BLN. YLL (th. bl ybl)			
	II.A	9	123		207	181	26			207
	III.D	13	224		237	258	(21)			237
	III.C	6	164		170	197	(27)			170
	III.B	12	53		65	56	9			65
	III.A	3	23		25	41	(15)			26
					144	143	1			144
		47	804		144	999	(4)			999
		47	809		144	999				999
			(5)			(4)				(4)

POSISI MENURUT GOLONGAN

S T A F : NON STAF :

KSWT
Honor

JUMLAH BULAN INI :
 Jumlah bulan ybl :
 Tambah / Kurang :

Uraian	PEGAWAJ		PEGAWAJ GOL. IA-IVD		PEGAWAJ MUSIMAN TEMPORER		KWT	JUNJAH JUMELAH PEG. BLN. INI		+ Jumlah & Kurang (thd bl. ybl)	L M-G	D M G	Jml. Peg. yg diam
	Bulanan	Harian	Jumlah	Harian	Jumlah	BLN. INI		BLN. LL					

POSISI MENENT. UMER	4	8	11	23	8	1	36	43	43	158	158	158	95
S/D. 30 TH.													
31 TH. S/D. 40 TH.													
41 TH. S/D. 50 TH.													
51 TH. S/D. 55 TH.													
55 TH. KEATAS													
JUNJAH BULAN INI	47	804	104	552	140	1	144	144	305	305	305	995	320
Jumlah bulan ybl	47	309	309	309	309	1	144	144	309	309	309	994	320
Tambah / Kurang	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)

Alamat WP : PABRIK GULA SEMBORO - SEMBORO - JEMBER
SEMBORO Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Uraian Pembayaran *)	
		

sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Masa
 Tahunan
 Final
 STP
 SKPKB
 SKPKBT

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>											

Diisi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang :
Diisi dengan huruf

.....

Tempat Uang Teraan :
Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :
 Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

WP : - - - - diisi sesuai kartu NPWP
 Nama WP : PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (FRSERO)
 Alamat WP : PABRIK GULA SEMBORO - SEMBORO - JEMBER
 SEMBORO Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran
 Uraian Pembayaran *)

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT
Peri tanda silang pada kolom yang berkenaan
 an Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Peri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan
 Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh
 Rp.
 Terbilang :
Diisi dengan huruf

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl. <small>Cap dan tanda tangan</small>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : - - - - diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)

Alamat WP : PABRIK CULA SEMBORO - SEMBORO - JEMBER
SEMBORO Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Uraian Pembayaran *)
------------------------	---	---	----------------------

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun <small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small>
<input type="text"/>												

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, inai dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small>	Terbilang :
Rp.	<small>Diisi dengan huruf</small>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak/Penyetor, tgl.
<small>Cap dan tanda tangan</small>	<small>Cap dan tanda tangan</small>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)

Alamat WP : PABRIK CULA SEMBORO - SEMBORO - JEMBER
SEMBORO Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

Uraian Pembayaran *)

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, tinal dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran *Diisi dengan pembayaran rupiah penuh* Rp.

Terbilang *Diisi dengan huruf* :

Ruang Teraan *Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl.
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI,
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)

Alamat WP : PABRIK CULA SEMBORO - SEMBORO - JEMBER

..SEMBORO..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags S D Okt Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang :

Diisi dengan huruf

uang Teraan

Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl.

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Informasi :

Untuk PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Untuk PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KELUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

Digital Repository Universitas Jember

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HARI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM

□ □ □ □

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK : FT PERKEBBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)
NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 0 0 1 6 7 4 0 5 2 6

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> • JUMLAH > ORANG - YANG MEMPUNYAI NPWP > ORANG - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP > ORANG 				
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP > ORANG				
C. JUMLAH A+B > ORANG				

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

Digital Repository Universitas Jember
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721 - B

DAFTAR PEKAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEKAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK :

B. NPWP PEMOTONG PAJAK : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL 			
1.	PEKAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG			
2.	PEKAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEKAWAI, SEBANYAK ORANG			
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG			
4.	KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEKAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG			
5.	MANTAN PEKAWAI, SEBANYAK ORANG			
6.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG			
7.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG			
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL 			
8.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ORANG			
9.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEKAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG			
10.	PEJABAT NEGARA, PEKAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG			
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 26 			
11.	PEKAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG			
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 : ORANG			

CATATAN:
PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak :

N P W P :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Netto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp.		*)	Rp.
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		10 %	Rp.
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.	40 %	15 %	Rp.
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.		*)	Rp.
5.	Imbalan Lainnya	Rp.		*)	Rp.
J U M L A H					Rp.

*) Lihat petunjuk pengisian.

Pemotong Pajak,

Nama :

NPWP :

Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

B. PPh Pasal 21 yang dipotong final

Golongan Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi	Rp.	Rp.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP.

..... 20.....

Pemotongan Pajak

Nama :

N P W P :

Alamat :

.....

Tanda tangan, nama dan cap

- *) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
- ***) Coret yang tidak perlu

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor :
Tanggal :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn pajak :

nama :
alamat :
jenis Pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
di terima : 1. langsung
2. melalui pos

Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses

Uraian	Prf/Tg
PENYIDIKAN	
1. Diberitahukan kepenuntut umum
2. Penyidikan
3. Selesai disidik
4. Disampaikan kepenuntut umum

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
Seksi :
Diterima Seksi
Selesai diproses
Diteruskan ke :	
Seksi :
Diterima Seksi
Selesai diproses
Diteruskan ke :	
Seksi :
Diterima Seksi
Selesai diproses

PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PPN	
Uraian	Prf/Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q - 1
2. Selesai di-Edit
3. Selesai direkam
4. Dicatat pada 1Q - 2
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap
7. Sederhana :	
7.1. Lapangan
7.2. Kantor

Uraian	Prf/Tg
PENETAPAN	
1. STP
2. SKPN
3. SKPKB
4. SKPKBT
5. SKPLB
RESTITUSI	
1. SKPKPP
2. SPMKP
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan keinduk berkas
2. Diteruskan ke :
.....
3. Diterima kembali



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

pon :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak :

nama :
alamat :
jenis Pajak :

Petugas penerima,

NIP :

FORMULIR PERINTAH KERJA LEMBUR

NAMA : _____
 BAGIAN : _____ REGESTER : _____ BULAN : _____ TAHUN : 2001.

TGL	M/D	S/D	JML	BIASA	MINGGU	BESAR	PARAF RC SEBELUM	URAIAN PEKERJAAN	PARAF RC SESUDAH
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
JML FAKTOR LEMBUR								=	JAM=RP

_____ DIBUAT _____ PERINTAH LEMBUR _____ DISETUJUI _____ DIKETAHUI

FORMULIR PERINTAH KERJA LEMBUR

NAMA : _____
 BAGIAN : _____ REGESTER : _____ BULAN : _____ TAHUN : 2001.

TGL	M/D	S/D	JML	BIASA	MINGGU	BESAR	PARAF RC SEBELUM	URAIAN PEKERJAAN	PARAF RC SESUDAH
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
JML FAKTOR LEMBUR								=	JAM=RP

_____ DIBUAT _____ PERINTAH LEMBUR _____ DISETUJUI _____ DIKETAHUI

lampiran 12

DAFTAR GAJI + TUNJANGAN PEGAWAI TETAP GOLONGAN IA S/D IID

PERKEBUNAN XI (PERSERO) PG. SEMBORO

No. URUT	NIK	NAMA PEGAWAI	GOL. SKALA	JUMLAH JAM LEMBUR	STP PK	GAJI	TUNJANGAN				IPENS 4,85%	JAMS. TEK 4,54%	PPh.21 LAIN-LAIN	UANG LEMBUR	GAJI KOTOR	JUMLAH POTONGAN	SISA DIBAYAR	TTP
							KHUSUS	KOMTUG	SEWA RUMAH	LIST AIR B.B								

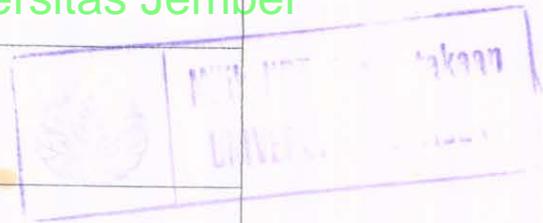
Sumber : PG. Semboro

Lampiran 13

DAFTAR GAJI PEGAWAI TETAP GOLONGAN IIIA S/D IVD

PT PERKEBUNAN XI (PERSERO) PG. SEMBORO

NO. URUT	NIK	NAMA PEGAWAI	STA PIK	GOL SKALA	JML HDR	GAJI	TUNJANGAN			I PENS 4,85%	JAMS. TEK 4,24%	Pph.21 LAIN-LAIN	GAJI KOTOR	JUMLAH POTONGAN	SISA DIBAYAR
							STRUKTURAL	FUNGSIONAL	KOMUNIKASI						
							SEWA RUMAH	LIST. AIR	B.BAKAR						



Sumber : PG. Semboro